

ABSTRAK

Masyarakat mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari menyebabkan masyarakat menjual, menggadaikan dan menjaminkan harta bendanya serta melakukan pinjaman kredit ke seseorang atau lembaga penerima jaminan kredit Indonesia, salah satunya jaminan fidusia. Dalam jaminan fidusia, objek jaminan fidusia tetap berada di bawah penguasaan pemberi fidusia atau debitor, sedangkan kreditur menerima bukti kepemilikan, seperti apabila objek jaminannya adalah kendaraan bermotor, maka kreditur menerima BPKB. Pada prakteknya, BPKB yang ada di penguasaan kreditur hilang. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum hilangnya BPKB sebagai objek jaminan dan perlindungan hukum bagi pemberi fidusia terhadap hilangnya BPKB sebagai objek jaminan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian nondoktrinal, sedangkan spesifikasi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah hilangnya BPKB tidak menggugurkan kekuatan hukum dari jaminan fidusia, tetapi secara ekonomi, debitor mengalami kerugian dan hambatan dalam hal urusan administrasi kendaraan bermotor. Perlindungan hukum bagi debitor atas hilangnya BPKB adalah perlindungan hukum preventif berupa penerapan prinsip kehati-hatian, pengaturan secara eksplisit dalam UU Perlindungan Konsumen dan Akta Jaminan Fidusia, serta perlindungan hukum represif berupa itikad baik dari kreditur dalam membiayai segala pengurusan kendaraan bermotor dan gugatan ke pengadilan.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pemberi Fidusia, BPKB, Hilang, Jaminan Fidusia

ABSTRACT

Economic hardships have driven individuals to pledge their assets through credit loans to fulfill daily necessities, which is often facilitated by credit guarantee institutions, mostly through fiduciary guarantees. In fiduciary guarantee, the physical object remains under the possession of the grantor, while the creditor holds the legal proof of ownership, example when the collateral involves a motor vehicle, the creditor retains the BPKB (Vehicle Ownership Document). However, instances occur where the BPKB held by the creditor is lost. This research aims to know the legal implications of the loss of the BPKB and legal protections to the debtor. The method used in this research is non doctrinal research approach, while the research specification is descriptive-analytical. The results from this research that the loss of the BPKB doesn't necessarily nullify the legal validity of the fiduciary guarantee; nevertheless, the debtor suffers significant economic losses and administrative obstacles. Legal protection for the debtor is preventive legal protection, such as the application of the principle of prudence and explicit regulations within the Consumer Protection Law. Additionally, repressive legal protection is the requirement for creditors to demonstrate good faith by covering all administrative costs and procedures required for vehicle documentation and through court litigation.

Keywords: *Legal Protection; Debtor; BPKB; Missing; Fiducia Guarantee*